



Tinjauan terhadap pelaksanaan putusan hakim tentang pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran setelah berlakunya UU No.1, 1974  
REVIEW OF THE COURT DECISION ON THE DIVISION OF CO-OWNED PROPERTY FOLLOWING A DIVORCE OF A MIXED MARRIAGE AFTER THE ISSUANCE OF THE ACT NO.1/1974  
(A CASE STUDY ON THE DECISION NO. 114/Pdt.G/1974)

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
(studi kasus putusan nomor 114/Pdt.G/PN.Sleman)

Yuliati Dwi Nastiti<sup>1</sup> dan Sularto<sup>2</sup>

Program Studi Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk memutus sengketa tentang pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (studi kasus putusan no.114/Pdt.G/2000/PN.Sleman), serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

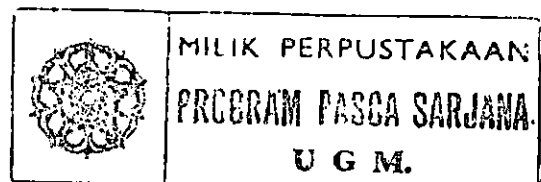
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (empiris), sehingga penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Sesuai dengan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sekaligus menjawab permasalahan bahwa dasar pertimbangan hakim untuk memutus sengketa tentang pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran berdasarkan pada ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara yang pada prinsipnya menyatakan adanya perbuatan melanggar hukum, sehingga pihak pelanggar harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, selain itu hakim juga memperhatikan prinsip keadilan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan disini adalah barang yang dieksekusi sudah berpindah tangan dan apabila barang yang dieksekusi berada diluar negeri.

Kata-kata kunci: Tinjauan terhadap pelaksanaan putusan

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta





Tinjauan terhadap pelaksanaan putusan hakim tentang pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran setelah berlakunya UU No.1, 1974  
**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 114/Pdt.G/2000/PN.SLEMAN)**

REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF THE COURT DECISION ON THE DIVISION OF COLLECTIVELY-OWNED PROPERTY FOLLOWING A DIVORCE OF A MIXED MARRIAGE AFTER THE ISSUANCE OF THE ACT NO.1/1974 (A CASE STUDY ON THE DECISION NO. 114/Pdt.G/PN SLEMAN)

Yuliati Dwi Nastiti<sup>1</sup>dan Sularto<sup>2</sup>

Program Studi Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This research aims to study the legal base for the judge's consideration in deciding a dispute on the division of collectively-owned property following a divorce of a mixed marriage after the issuance of the Act no. 1/1974 (A case study on the decision no 114/Pdt 6/2000/PN sleman), and to identify obstacles in the implementation of this court decision.

This is a normative juridical research supported by a field (empirical) research. As the result, it uses 2 types of data, the primary and the secondary data. The former are obtained from an interview while the latter is derived from a library research by tracing the primary, secondary and tertiary legal materials. These data are analysed qualitatively.

From the research findings was drawn a conclusion, which at the same time also answers the problem addressed in the research, that the legal bases for the judge decision to settle a dispute on the division of collectively-owned property following a divorce of a mixed marriage are the article 37 of the Marital Code and the article 1365 of the Civil Code which in principle states a violating act so the offender must provide compensation for the other side suffering from the loss. In addition, the judge needs to consider the fairness principle. The obstacles in the implementation of the court decision arise when the executed property has ben transferred to another owner, and if the property happens to be in another country.

Keywords: Review on The implementation of a decision

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

